

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)
DI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Febri Mulyani
NPP. 29.1069

*Asdaf Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*

Email : febrimulyani20@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): In empowering BUMDes, there are still obstacles, namely the slow distribution of funds, lack of communication between village heads and administrators in management, lack of training for administrators so that many administrators are not ready to run the BUMDes program and also lack of administration and financial reporting that has not been carried out properly. **Purpose:** To examine and describe how the empowerment of rural communities is carried out by the Community and Village Empowerment Service through Village-Owned Enterprises in Selat District, Kapuas Regency, Central Kalimantan Province. **Method:** The method used in this research is descriptive qualitative with a deductive and analytical approach to empowerment strategies according to Ismawan's theory. Data collection techniques were carried out by interview (14 informants), observation and documentation. **Result:** The DPMD of Kapuas Regency has implemented Village Community Empowerment through BUMDes, but the empowerment that has been implemented has not been maximized such as the lack of quality of existing village human resources, the results of the programs being implemented are not satisfactory, and the lack of coordination implemented in the management of BUMDes. **Conclusion:** The empowerment of rural communities through BUMDes carried out by the DPMD has not been maximized, both in terms of human resource development, group institutional development, cultivating community (private) capital, productive business development, and provision of appropriate information. In order to increase the role of the Regional Community Empowerment Service in empowering the community through BUMDes, it is recommended that the Kapuas Regency DPMD focus more on improving individual abilities, facilitating partnership cooperation for community business actors, developing extension and coaching programs on an ongoing basis, and planning the allocation of funds since the program was created. **Keywords:** Empowerment; Public; Village Owned Enterprises

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang: Dalam memberdayakan BUMDes ini masih ada kendala yaitu lambatnya penyaluran dana, kurangnya komunikasi antar kepala desa dengan pengurus dalam pengelolaan, minimnya pelatihan untuk pengurus sehingga banyak pengurus yang tidak siap menjalankan program BUMDes dan juga minimnya administrasi dan pelaporan keuangan yang belum dijalankan dengan baik. **Tujuan:** Untuk mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan oleh Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa melalui Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan deduktif dan analisis terhadap strategi pemberdayaan menurut Teori Ismawan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (14 informan), observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** DPMD Kabupaten Kapuas telah melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui BUMDes, namun yang pemberdayaan yang dilaksanakan belum maksimal seperti kurangnya kualitas SDM desa yang ada, program yang dilaksanakan hasilnya kurang memuaskan, dan kurangnya koordinasi yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes. **Kesimpulan:** Pemberdayaan Masyarakat desa melalui BUMDes yang dilaksanakan oleh DPMD belum maksimal baik dari pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat (swasta), pengembangan usaha produktif, penyediaan informasi tepat guna. Guna meningkatkan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam memberdayakan masyarakat melalui BUMDes disarankan agar DPMD Kabupaten Kapuas lebih memfokuskan kepada peningkatan kemampuan individu, memfasilitasi kerjasama kemitraan bagi para pelaku usaha masyarakat, menyusun program penyuluhan dan pembinaan secara berkesinambungan, serta merencanakan alokasi dana sejak dibuatnya program.

Kata kunci: Pemberdayaan; Masyarakat; Badan Usaha Milik Desa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberdayaan memiliki peranan penting dalam sebuah tata pemerintahan yang baik guna meningkatkan kemandirian masyarakat. Masyarakat sebagai subyek dari pembangunan berperan penting dalam pembangunan karena merupakan instrumen utama dalam pembangunan sebuah negara.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (UU No.6 Pasal 6 Tahun 2014).

Di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, pengurusan dan pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;

- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Provinsi Kalimantan tengah merupakan salah satu provinsi yang gencar dalam memberdayakan masyarakat desa melalui program Badan Usaha Milik Desa. Tercatat dari 1.432 desa yang ada di Kalimantan tengah, sudah berdiri sebanyak 910 Badan Usaha Milik Desa yang melibatkan sebanyak 3.250 orang terdiri dari pengurus sebanyak 2.927 orang dan tenaga kerja sebanyak 323 orang. Dimulai tahun 2015 kontribusi Badan Usaha Milik Desa terhadap pendapat asli desa memang terus tumbuh yang semula hanya di kisaran Rp.10.000.000 berkembang desa.

Selain permasalahan tersebut, permasalahan mengenai tingkat pengangguran yang tidak stabil dan cenderung naik di Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Kapuas yang menjadi titik dari penelitian ini. Di Kabupaten Kapuas sendiri, menurut data tahun 2021 oleh DPMD Kabupaten Kapuas, memiliki 213 BUMDes dari jumlah keseluruhan desa yang ada yaitu 214 Desa. Namun, walaupun begitu terdapat 45 desa yang belum aktif dan 1 Desa tercatat belum mempunyai BUMDes. Di Kecamatan Selat sendiri terdiri dari 8 kelurahan dan 2 desa, namun hanya satu desa yang mempunyai BUMDes aktif.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Dibalik pertumbuhan yang berkembang masih ada pelaksanaan program yang kurang membuatnya menjadi optimal. Hal ini dikarenakan dari 910 Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kalimantan Tengah hanya ada 509 Badan Usaha Milik Desa yang aktif sedangkan 401 Badan Usaha Milik Desa lainnya tidak aktif. Hal ini tentu saja merupakan permasalahan yang tidak boleh di biarkan oleh pemerintah karena hampir 50% dari jumlah Badan Usaha Milik Desa yang ada bersifat mati atau tidak aktif.

Selain kendala dalam aspek kuantitas, kendala didalam aspek kualitas pengembangan Badan Usaha Milik Desa juga terjadi. Permasalahan dalam pengoptimalisasian pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kapuas menurut kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa mengatakan kendala terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti penyertaan modal yang lambat disalurkan, banyak pengurus tidak siap dalam menjalankan usaha Badan Usaha Milik Desa, kurangnya jiwa kewirusahaan pengurus, ketidakpercayaan kepala desa kepada pengurus Badan Usaha Milik Desa, kurangnya komunikasi antara kepala desa dengan pengurus dalam pengelolaan, minimnya administrasi dan pelaporan keuangan, dan pelatihan terhadap pengurus yang masih belum dijalankan dengan baik dan terpadu.

Banyaknya permasalahan tersebut membuat pemerintah harus mengevaluasi kembali program Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kabupaten Kapuas, terlebih Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas yang menangani langsung program tersebut.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian Sumantara dkk yang berjudul *SWOT Analysis of Village Owned Enterprises (BUMDes) Trading Business of*

“Ayu Bagia” Goods In Baha Village Kecamatan Mengwi Badung District-Bali (Sumantara dkk, 2019) menemukan bahwa hasil analisis SWOT yang diperoleh berada pada kuadran I, yang artinya apabila dilakukan dengan strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Maka hal ini sangat bermanfaat bagi BUMDes di Desa Baha yang memiliki peluang dan kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Penelitian Sosiawan menemukan program BUMDes dalam memberdayakan masyarakat terlaksana secara optimal dengan 4 bina, yakni bina manusia, bina usaha, bina lingkungan, dan bina kelembagaan, dan mengenai dampak dari program ini menunjukkan hasil positif yang dilihat dari dampak ekonomi, sosial serta politik (Sosiawan, 2018). Penelitian Ruth Agnesia menemukan bahwa Peran Dinas PMD Kabupaten Blitar dalam memberdayakan masyarakat di kawasan agroindustri nenas Desa Sidorejo, dilakukan dengan mewujudkan keberdayaan masyarakat selaku inti dari pembangunan, dengan didasarkan dalam lima tahapan menurut teori dari Soetomo (2006) dan dari semua tahapan tersebut, peran Dinas PMD belum berjalan optimal menciptakan masyarakat selaku inti dari pembangunan (Sembiring, 2021).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian ini lebih membahas mengenai peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam memberdayakan BUMDes. Selain itu pengukuran atau indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Ismawan dalam Prijono & Pranaka (1996) yang menyatakan bahwa terdapat 5 (lima) program strategi pemberdayaan yaitu pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat (swasta), pengembangan usaha produktif, dan penyediaan informasi tepat-guna.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kendala dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pemberdayaan masyarakat desa melalui program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan deduktif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi yang sudah didapatkan ketika pelaksanaan penelitian.

Penulis mengumpulkan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 14 orang informan yang terdiri dari kepala DPMD Kabupaten Kapuas, Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan, Direktur BUMDes masing-masing 1 orang, Pengelola BUMDes, Kepala Desa, Masyarakat Desa Kecamatan Selat dan masyarakat (yang berjumlah 6 orang dalam hal ini penerima dan pelaksana program BUMDes). Adapun analisisnya menggunakan teori pemberdayaan masyarakat yang digagas oleh Ismawan dalam Prijono & Pranaka (1996) yang menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat ada lima dimensi, yaitu pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok,

pemupukan modal masyarakat (swasta), pengembangan usaha produktif, penyediaan informasi tepat guna.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran DPMD Kapuas dalam memberdayakan masyarakat melalui program BUMDes menggunakan pendapat dari Ismawan dalam Prijono & Pranaka (1996) yaitu pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat (swasta), pengembangan usaha produktif, penyediaan informasi tepat guna Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut :

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Menunjukkan bahwa bentuk pemberdayaan masyarakat desa dalam pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Kapuas melalui BUMDes yang ada adalah dengan kegiatan pembinaan pengelola BUMDes. Upaya pemberdayaan tersebut tidak mengarah dan berdampak kepada masyarakat desa langsung secara keseluruhan tetapi lebih mengarah kepada masyarakat desa yang menjadi pengelola BUMDes saja dan tidak memberdayakan secara masyarakat secara individu.

b. Pengembangan kelembagaan kelompok

Menunjukkan bahwa bentuk dalam pembentukan BUMDes di setiap desa yang ada di kabupaten memiliki prosedur susai dengan peraturan perundangan yang ada dan ada tahapan tahapan dalam pembentukannya. Mulai dari sosialisasi BUMDes, musyawarah desa terkait pembentukan BUMDes hingga pemilihan untuk pengurus BUMDes yang akan didirikan. Kekurangan yang terdapat dalam dimensi pengembangan kelembagaan kelompok yang dilaksanakan DPMD adalah upaya pemberdayaan yang dilaksanakan oleh DPMD sifatnya hanya sebatas pengawasan terhadap terbentuknya BUMDes yang ada di Kabupaten Kapuas tetapi tidak menyentuh ke dalam organisasi BUMDes yang sudah terbentuk, BUMDes yang sudah terbentuk dijalankan oleh masyarakat desa yang menjadi pengurus BUMDes di desanya.

c. Pemupukan Modal Masyarakat (Swasta)

Menunjukkan bahwa DPMD telah melaksanakan tugasnya dalam penyertaan modal kepada BUMDes yang ada yang kemudian di salurkan ke masing-masing jenis usaha untuk dikembangkan, DPMD juga memantau dan memberikan arahan serta pelatihan baik kepada pengelola BUMDes maupun masyarakat Desa yang berpartisipasi aktif dalam pengelolaan BUMDes, hanya saja pembedayaan dalam dimensi usaha ini belum maksimal dikarenakan kurangnya upaya dari DPMD dalam membantu jenis usaha yang ada untuk bekerjasama dengan pihak ke-3, hal ini penulis amati dari sedikitnya pihak ke-3 yang masuk untuk mengembangkan usaha yang ada di desa.

d. Pengembangan Usaha Produktif

DPMD membantu para pelaku usaha serta masyarakat dalam pengembangan jualan baik itu melalui pameran ataupun bazaar penulis nilai sangat baik, dibuktikan dari berbagai program serta tingkat prestasi dari BUMDes yang memenangi berbagai perlombaan dan penghargaan baik tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Namun mengenai pengembangan usaha produktif sehari-hari yang secara digital penulis nilai belum optimal, baik pembuatan akun sosial media atau penjualan melalui website. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya usaha yang belum mempunyai akun sosial media maupun website untuk media dalam mengembangkan produk jualannya.

e. Penyediaan Informasi Tepat Guna

DPMD membantu para pengembang BUMDes dan para pelaku usaha dengan cara pemberian sosialisasi dan informasi yang tepat. DPMD memberikan informasi dan sosialisasi terkait info perkembangan pasar, dan perkembangan usaha. Hal itu biasa disampaikan secara langsung di kantor desa ataupun di aula dinas DPMD serta informasi juga diberikan melalui grup whatsapp yang dibuat untuk mempermudah komunikasi antara dinas DPMD dengan para pengurus BUMDes se-kabupaten Kapuas.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penulis menemukan temuan penting yakni pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes yang dilaksanakan oleh DPMD dalam perspektif teoretis belum maksimal. Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian milik Sumantara dkk (2019) penelitian ini bertujuan untuk meninjau kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk rencana mengembangkan BUMDES atau memperkuat peran BUMDes sedangkan penelitian yang dilakukan lebih membahas mengenai peran DPMD dalam memberdayakan BUMDes.

Penelitian Aryo Sosiawan (2018) menggunakan teori dari Mardikanto yaitu 4 bina yang meliputi bina manusia, bina usaha, bina kelembagaan dan bina lingkungan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menganalisis strategi pemberdayaan menggunakan pendapat dari Ismawan yang didalamnya terdapat 5 (lima) strategi pemberdayaan yaitu pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan kelompok, pemupukan modal masyarakat (swasta), pengembangan usaha produktif, penyediaan informasi tepat guna.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Ruth Agnesia Sembiring (2021) dimana penelitian tersebut menggunakan konsep dari Soetomo (2006) sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teori strategi pemberdayaan dari Ismawan.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat desa melalui BUMDes yang dilaksanakan oleh DPMD dalam perspektif teoretis belum maksimal dikarenakan program atau upaya yang

dilakukan DPMD belum terlaksana dengan baik. Guna meningkatkan peran DPMD dalam memberdayakan BUMDes di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ini, disarankan agar DPMD Kabupaten Kapuas lebih memfokuskan kepada peningkatan kemampuan individu, memfasilitasi kerjasama kemitraan bagi para pelaku usaha masyarakat, menyusun program penyuluhan dan pembinaan secara berkesinambungan, serta merencanakan alokasi dana sejak dibuatnya program.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Ismawan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. (2003). Ilmu sosial dasar : matakuliah dasar umum. Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2014). Prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik (Ke-15). Rineka Cipta.
- Badan Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. (2020). Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka 2020. 807.
- Bungin, B. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif.
- Creswell, J. W. (2016). Buku Research Design Pendekatan Metode Kualitatif Kuantitatif (4th ed.). Pustaka Pelajar.
- Daraba, D. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan. *Sosiohumaniora*, Volume 17 No. 2 Juli 2015: 168- 169, 17 (2).
- Faisal, M., & Daraba, D. (2016). Pemberdayaan Masyarakat. IPDN.
- Hendrawati Hamid, I. (2018). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat (M. S. Tuty Suciaty Razak, SH. (ed.); 1st ed.). De La Macca.
- Hermawan. (2019). Kontribusi BUMDes Kalimantan Tengah Naik 100 Persen Lebih. *Borneonews.Co.Id*. <https://www.borneonews.co.id/berita/126808-kontribusi-bumdes-kalimantan-tengah-naik-100-persen-lebih>
- Hidayat, M. A. (2019). Pertumbuhan pesat BUMDes di Kalteng bantu atasi masalah pengangguran. *Kalteng.Antaraneews.Com*. <https://kalteng.antaraneews.com/berita/322143/pertumbuhan-pesat-bumdes-di-kalteng-bantu-atasi-masalah-pengangguran>

- Hisnuddin Lubis. (2016). Pengentasan Kemiskinan: Belajar Dari Kegagalan Orde Baru.
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar ilmu antropologi. Rineka Cipta.
- Lamm, R. P., & Schaefer, R. T. (1998). Sociology / Richard T. Schaefer; in collaboration with Robert P. Lamm (3rd ed). McGraw-Hill.
- Mardikanto & Soebianto. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Presfektif Kebijakan Publik (5th ed.). Alfabeta, cv.
- Maryaeni. (2005). Metode penelitian kebudayaan (VII). BUMI AKSARA.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat. Deepublish.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode metode baru. Universita Indonesia.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. (2016). Sistem Akutansi (4th ed.). Salemba Empat.
- Naderifar, M., Goli, H., & Ghaljaie, F. (2017). Snowball Sampling: A Purposeful Method of Sampling in Qualitative Research. Strides in Development of Medical Education, 14(3). <https://doi.org/10.5812/sdme.67670>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- UU NO 6 Tahun 2014, Pub. L. No. 6/2014, 103 (2014).
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- Poerwandari, D. E. K. (2017). Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia (cetakan 20). LPSP3 UI.
- Prijono, O. ., & Pranaka, A. M. . (1996). Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi. CSIS.
- Sembiring, R. A. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Memberdayakan Masyarakat di Kawasan Agrowisata Nenas. Musamus Journal of Public Administration, 3, 15. <https://doi.org/https://doi.org/10.35724/mjpa.v3i2.3392>
- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2013). Sosiologi Suatu Pengantar (Ke-45). Rajawali Pers.